

POHON KINERJA SEKRETARIAT DAERAH

(36) Menuju Bukhori Kelas Dunia
1. Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel dan Transparan
2. Meningkatkan Kehidupan Sosial dan Keagamaan

S0
BUPATI/WALI KOTA

Terlaksananya Pengkoordinasian, Penyelidikan dan Pengharmonisan Penyelenggaraan seluruh urusan pemerintahan yang telah didesentralisasikan ke Pemerintah Kabupaten
1. Terlaksananya penyelenggaraan urusan lingkup koordinasi bidang pemerintahan dan kew
2. Terlaksananya penyelenggaraan urusan lingkup koordinasi bidang perekonomian dan pembangunan
3. Terlaksananya penyelenggaraan urusan lingkup koordinasi bidang administrasi

S1
SEKRETARIS DAERAH

RUJUK

RESTRUK / SB

SP

Terlaksananya penyelenggaraan urusan lingkup koordinasi bidang pemerintahan dan kew
1. Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
2. Evaluasi pelaksanaan kebijakan dan capaian kinerja terkait kesejahteraan sosial

Terlaksananya penyelenggaraan urusan lingkup koordinasi bidang perekonomian dan pembangunan
1. Terlaksananya administrasi pembangunan
2. Terlaksananya pengelolaan barang dan jasa
3. Terlaksananya kebijakan perekonomian
4. Terlaksananya pemantauan kebijakan sumber daya alam

Terlaksananya penyelenggaraan urusan lingkup koordinasi bidang administrasi
1. Pelaksanaan administrasi barang milik daerah
2. Pelaksanaan administrasi kepegawaian perangkat daerah
3. Pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah
4. Pelaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah
5. Pengadaan barang milik daerah
6. Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah
7. Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah
8. Pelaksanaan protokol dan komunikasi pimpinan
9. Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah
10. Pelaksanaan penataan organisasi

S2
ASISTEN

Bagian Pemerintahan
1. Penataan Administrasi Pemerintahan
2. Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri

Bagian Kesejahteraan Rakyat
1. Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual KABUPATEN
2. Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial
3. Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat

Bagian Hukum
1. Fasilitasi dan koordinasi hukum

Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam
1. Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian
2. Pemantauan Kebijakan Terkait Sumber Daya Alam

Bagian Administrasi Pembangunan
1. Pelaksanaan Administrasi Pembangunan

Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
1. Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa

Bagian Umum dan Protokoler
1. Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah
2. Pelaksanaan administrasi kepegawaian perangkat daerah
3. Pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah
4. Pengadaan barang milik daerah
5. Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah
6. Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan

Bagian Perencanaan dan Keuangan
1. Pelaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah
2. Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah

Bagian Organisasi
1. Pelaksanaan penataan organisasi

S3
PALA BAGIAN

Penataan Administrasi Pemerintahan
1. PENATAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
2. PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEWILAYAHAN
3. FASILITASI PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH

Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
1. FASILITASI PELAKSANAAN STQH TINGKAT KABUPATEN
2. FASILITASI PELAKSANAAN STQH TINGKAT PROVINSI
3. FASILITASI PELK. SAFARI RAMADHAN KEC. DARATAN
4. FASILITASI PEMBERANGKATAN JAMA'AH CALON HAJI
5. FASILITASI PEMULANGAN JAMA'AH HAJI
6. FASILITASI PELK. ZIKIR DAN DOA AKHIR TAHUN
7. PELAKSANAAN PERINGATAN HARI-HARI BESAR NASIONAL
8. PELAKSANAAN PERINGATAN HARI-HARI BESAR ISLAM
9. PELAKSANAAN FESTIVAL DAI

Fasilitasi dan koordinasi hukum
1. FASILITASI PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH
2. FASILITASI BANTUAN HUKUM
3. PENDOKUMENTASIAN PRODUK HUKUM DAN PENGELOLAAN

Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian
1. KOORDINASI, SINKRONISASI, MONITORING DAN EVALUASI
2. PENINGDALAN INFILASI DAERAH
3. PERENCANAAN DAN PENGAWASAN EKONOMI MIKRO KECIL

Pelaksanaan Administrasi Pembangunan
1. PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI KEGIATAN PEMBANGUNAN
2. EVALUASI PENGELOLAAN KEGIATAN DAK
3. EVALUASI KEGIATAN PENGAWASAN PEMBANGUNAN (BAKORBIANG)

Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
1. Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
2. Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik
3. Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa

Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah
1. Pemeliharaan Mebel
2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
3. Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
4. Pemeliharaan (Rehabilitasi) Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
5. Pemeliharaan (Rehabilitasi) Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
6. Pemeliharaan (Rehabilitasi) Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
7. Penyediaan jasa, biaya pemeliharaan pajak dan peritinan operasional dari bangunan

Pelaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah
1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

Pelaksanaan penataan organisasi
1. PENGELOLAAN KELEMBAGAAN DAN ANJAK
2. FASILITASI PELAYANAN PUBLIK DAN TATA LAKSANA
3. PENINGKATAN KINERJA DAN RB
MONEY DAN PENGELOLAAN KUALITAS YANGKJ DAN TALAK
KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LKPD

Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri
1. FASILITASI PELAKSANAAN KERJA SAMA DAERAH

Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial
1. PELAKSANAAN SELEKSI CALON PIMPINAN BAKOR KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
2. KOMISI PENANGGULANGAN HIV/AIDS
3. VERIFIKASI RUMAH-RUMAH MADAH
4. BELAKA BERBAH LANG. KEPALA LEMAGA PEMERINTAH, ORGANISASI DAN KELOMPOK

Pemantauan Kebijakan Terkait Sumber Daya Alam
1. Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Perikanan, Kehutanan,
2. Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Rerui dan Air
3. Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Perambungan dan

Pelaksanaan administrasi kepegawaian perangkat daerah
1. Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannyadan
2. Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsinya
3. Hibridasi Teknis Sub Implementasi Peraturan Perundang-

Pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah
1. Penyediaan Bahan (Material)
2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
4. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
5. Fasilitas Kunjungan Tamu

Pengadaan barang milik daerah
1. Pengadaan Perawatan dan Perlempangan Kantor
2. Pengadaan Mebel
3. Pengadaan Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah
1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan
1. Fasilitasi Kerprotokolan
2. Pendokumentasian Tugas Pimpinan

PROSES / DWPT